



Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat

Putri Destiani Nur Elliott¹, Rahma Andriani², Rakhmat Prabowo³
Universitas Pendidikan Indonesia^{1,2,3}

*Correspondence: E-mail: rahmandriani@upi.edu

ABSTRACT

Public development, especially in the education and health sectors, in West Java is often uneven, especially in remote areas, where education and health facilities are not yet fully adequate. Therefore, the aim of this research is to investigate the effect of government spending in the education and health sectors on increasing the Human Development Index in the region. HDI is an important indicator in measuring the social and economic development of an area. This research uses secondary data obtained from various sources covering the period of the last several years (2017 to 2022) in West Java. The method used in this research uses the GLS (Generalized Least Squares) approach with a fixed effect model. Based on the regression results, it was found that general allocation funds had a significant negative effect on HDI, while the realization of the government budget and GRDP had a significant effect on increasing the human development index.

© 2023 Kantor Jurnal dan Publikasi UPI

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 19 February 2024

First Revised 03 March 2024

Accepted 25 February 2024

First Available online 07 April 2024

Publication Date 31 May 2024

Keyword:

Government spending, Education, Health, Gross Regional Domestic Product and HDI

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2001, pemerintah pusat mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah sebagai upaya untuk memberdayakan daerah dalam mengelola pembangunan melalui desentralisasi fiskal. Kebijakan ini memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan melalui peningkatan kualitas layanan publik. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola potensinya sendiri untuk mendorong pembangunan dan pemerataan yang inklusif dan berkelanjutan, terutama dalam dimensi umur panjang dan hidup sehat, pendidikan, serta standar hidup layak. Dukungan penuh dari pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan dapat memastikan kesejahteraan setiap daerah di Indonesia.

Menurut Adi (2009) Pembangunan hakikatnya merupakan pembangunan manusia, perlu diprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan pembangunan manusia dalam penyusunan anggaran daerah, khususnya anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan, dua sektor tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan manusia dilihat melalui indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia merupakan suatu cara untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan serta kesejahteraan kepada masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Indeks pembangunan manusia ini diharapkan dalam jangka panjang dapat mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk menciptakan kesejahteraan manusia serta meningkatkan kualitas sektor publik di Indonesia secara merata.

Beberapa penelitian mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan Indeks pembangunan manusia (Widodo et al., 2012) Bahwasanya pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor publik tidak secara langsung dapat mempengaruhi peningkatan IPM ataupun kemiskinan melainkan secara bersama-sama simultan pengeluaran sektor publik tersebut mempengaruhi kemiskinan sehingga meningkatkan Indeks pembangunan manusia, hal ini berarti pengeluaran pemerintah terhadap sektor pendidikan dan kesehatan tidak bisa berdiri sendiri sebagai variabel independen sehingga memerlukan variabel lain sebagai pure moderator. Pendapat lain menurut (Dinas Kesehatan Jawa Barat, 2021) Pengeluaran pemerintah daerah dalam fungsi ekonomi dan kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sementara itu, pengeluaran pemerintah dalam pendidikan berdampak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meskipun pengaruhnya bersifat tidak langsung melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB meningkatkan indeks pembangunan dengan menetapkan alokasi dana untuk anggaran pendidikan.

(Putrisandya & Dewi, 2019) bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM disebabkan karena anggaran yang diberikan belum teralokasikan dengan baik sehingga perlu diarahkan agar dapat menunjang pembangunan secara merata dan efisien sedangkan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM dan DAK berpengaruh signifikan positif terhadap IPM. Sama halnya dengan penelitian

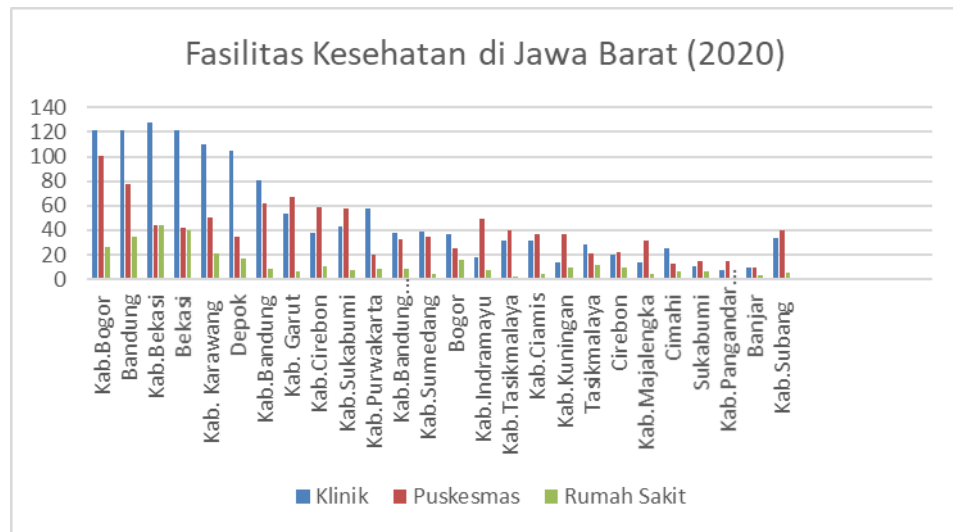
(Fadhly, 2013) dana alokasi umum berpengaruh signifikan negatif terhadap indeks Pembangunan manusia mengidentifikasi bahwa kenaikan DAU akan menyebabkan IPM mengalami penurunan sedangkan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan indeks Pembangunan manusia. Selain itu penelitian menurut (Amalia Yunia Rahmawati, 2020) Bahwasanya pengeluaran pemerintah terhadap fungsi ekonomi, pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh yang berbeda beda, fungsi ekonomi berpengaruh terhadap PDRB tetapi tidak mempengaruhi secara langsung terhadap peningkatan IPM, fungsi ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga berdasarkan analisis terdapat pengaruh yang signifikan positif dalam peningkatan PDRB. Sebaliknya pada fungsi Kesehatan memiliki pengaruh terhadap peningkatan IPM tetapi tidak berpengaruh terhadap PDRB. Dan terakhir Fungsi Pendidikan, berpengaruh signifikan terhadap peningkatan indeks Pembangunan manusia tetapi tidak secara langsung melainkan melalui PDRB.

Teori ekonomi kesejahteraan menurut Pigou (1960:11) merupakan suatu bagian kesejahteraan sosial yang dihubungkan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Kesejahteraan merupakan bagaimana seseorang dapat memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatannya. Terdapat peran pemerintah daerah untuk membantu masalah kesejahteraan masyarakat melalui otonomi daerah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat (Sasana, 2009). Teori Rostow dan Musgrave dalam hubungannya dengan perkembangan pengeluaran pemerintah dan tahap-tahapan pembangunan ekonomi. Kontribusinya dalam pengembangan teori keuangan publik, memperkenalkan konsep tiga fungsi pengeluaran pemerintah, yaitu alokasi (*allocation*), distribusi (*distribution*), dan stabilisasi (*stabilization*). Konsep ini mencerminkan peran sentral pemerintah dalam mengelola keuangan publik dengan tujuan mencapai sasaran ekonomi dan sosial. Dalam konteks pembangunan ekonomi, khususnya pada tahap awal, diharapkan bahwa pemerintah memegang peran penting dalam penyediaan infrastruktur dasar dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Ini sesuai dengan gagasan alokasi sumber daya pemerintah untuk mendukung pembangunan ekonomi dalam peningkatan Indeks Pembangunan manusia. Khususnya untuk pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan Kesehatan yang dilakukan secara bijaksana dan strategis dalam pengeluarannya dapat membantu pergerakan Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan IPM untuk menciptakan lapangan kerja, menanggulangi kemiskinan, serta peningkatan akses pada sektor pendidikan, Kesehatan dan sektor publik lainnya.

Menurut BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia terus meningkat setiap tahun. Provinsi Jawa Barat mencapai 73,12 pada tahun 2022, kategori tinggi. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam tiga dimensi utama: umur panjang dan sehat, pendidikan, serta standar hidup layak. Kenaikan IPM ini sejalan dengan keberhasilan pemerintah dalam mengelola kebijakan otonomi daerah, khususnya dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Meskipun demikian, terdapat ketidakmerataan akses terhadap kesejahteraan di beberapa kabupaten atau kota di Jawa Barat. Fasilitas sarana dan prasarana, terutama di daerah terpencil, masih belum memadai, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua masyarakat dapat mengakses dan menikmati kesejahteraan

secara merata di setiap daerah.

Dilansir dari *website* open.data.jabarprov, melalui visualisasi jumlah fasilitas Kesehatan di provinsi Jawa Barat tahun 2020.

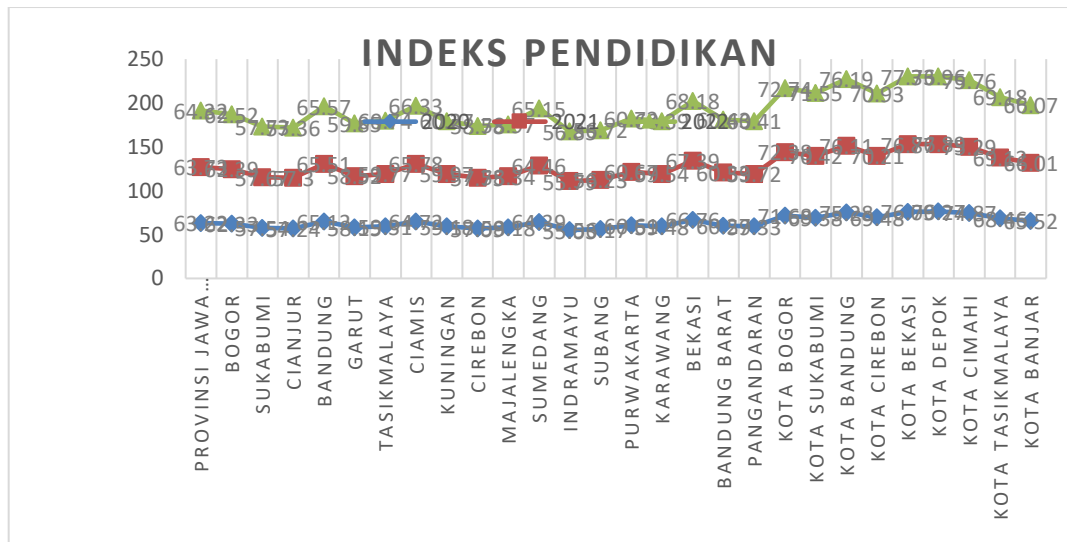


Sumber : Open Data Jabar (data diolah)

Gambar 1. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Jawa Barat

Bahwasanya fasilitas kesehatan secara keseluruhan belum merata di Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Fasilitas kesehatan di Kabupaten/Kota Jawa Barat belum merata, terlihat dari data tahun 2020 terdapat 2778 unit, 49,17% klinik, 29,06% puskesmas, 11,77% rumah sakit. Rumah sakit memiliki persentase lebih rendah, menunjukkan rendahnya pemerataan fasilitas kesehatan di perkotaan dan pedesaan. Kabupaten Bogor, Kota Bandung, dan Kabupaten Bekasi memiliki fasilitas kesehatan terbanyak, sedangkan Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Sukabumi paling sedikit. Rasio jumlah fasilitas kesehatan hanya 0,28%, menunjukkan ketersediaan belum merata, disebabkan karena kurangnya infrastruktur, tenaga kesehatan, akses, dan faktor lainnya. Ketidakmerataan juga terlihat dalam sektor pendidikan di Jawa Barat. Indeks pendidikan tiga tahun terakhir menunjukkan perbedaan peningkatan di berbagai kabupaten/kota, mencerminkan tantangan dalam pembangunan manusia di wilayah tersebut.

Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kota Bogor menempati peringkat tertinggi dalam indeks pendidikan, sementara Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cirebon memiliki indeks pendidikan terendah. Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya indeks pendidikan di beberapa kota/kabupaten di Jawa Barat pandangan masyarakat yang masih kurang memprioritaskan pendidikan tinggi, selain itu disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Banyaknya anak yang putus sekolah di wilayah kabupaten/kota Jawa Barat disebabkan oleh ketidakstabilan perekonomian keluarga, yang memaksa sebagian anak untuk berhenti sekolah dan memilih untuk bekerja.



sumber : BPS Jawa Barat

Gambar 2. Indeks Pendidikan

Secara keseluruhan, dilihat dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di setiap kabupaten/kota di Jawa Barat setiap tahunnya, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dalam peningkatan IPM di berbagai wilayah. Dengan melihat latar belakang diatas, permasalahan yang akan dikaji adalah Bagaimana Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Sektor Publik dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder bersifat data panel, indikator yang digunakan berupa pengeluaran pemerintah pada realisasi dana alokasi umum (X1), pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan (X2) untuk realisasi anggaran pada bidang Kesehatan dan indeks pembangunan manusia (Y) di Kabupaten/kota se-Jawa Barat

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini teknik analisis panel dinamis, melalui pendekatan GLS (*Generalized Least Squares*) dengan *Fixed Effect Model* (FEM) pada data panel melibatkan perubahan dalam regresi untuk memasukkan efek individu atau efek waktu yang tidak berubah Sehingga rumus yang digunakan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \partial_i + u_{it}$$

Dimana :

Y_{it} : adalah indeks Pembangunan manusia (IPM) pada tahun t untuk individu i di Jawa Barat

X_{1it} : Pengeluaran pemerintah dana alokasi umum pada tahun t untuk individu i di Jawa Barat.

X_{2it} adalah Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan pada tahun t untuk individu i di Jawa Barat.

X_{3it} adalah PDRB pada tahun t di Jawa barat

δ_i adalah Efek Tidak Berubah untuk individu i (mengendalikan karakteristik individu yang konstan seiring waktu).

u_{it} adalah kesalahan acak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil estimasi model data panel, model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Efek Tetap (FEM) berdasarkan hasil Uji Chow dan Hausman. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik multikolinearitas dan heterokedastisitas.

	DAU	RAK	PDRB
DAU	1	0.6602521444909038	-0.04237150526310105
RAK	0.6602521444909038	1	-0.1070139057092773
PDRB	-0.04237150526310105	-0.1070139057092773	1

Sumber: Eviews 12

Gambar 3. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan dari hasil yang diperoleh rata-rata variabel indenpen < 0.80 . menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut tidak memiliki hubungan antar variabel sehingga dapat disimpulkan data tersebut tidak terkena masalah multikolineritas.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	29.87025	8.414577	3.549822	0.0005
DAU	0.013820	0.007828	1.765319	0.0795
RAK	-0.098404	0.150642	-0.653230	0.5146
PDRB	6.44E-05	0.000141	0.458248	0.6474

Sumber: Eviews 12

Gambar 4. Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas diperoleh hasil bawah nilai probabilitas X_1, X_2 dan $X_3 > 0,05$ hal ini menunjukan bahwa data tersebut tidak terkena masalah heterokedastisitas.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7047.812	146.6177	48.06929	0.0000
DAU	-0.343633	0.101039	-3.401001	0.0009
RAK	0.966898	0.352958	2.739414	0.0070
PDRB	0.016251	0.002277	7.136101	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	55.09307	R-squared	0.986537
Mean dependent var	7154.335	Adjusted R-squared	0.983557
S.D. dependent var	476.3043	S.E. of regression	61.07652
Akaike info criterion	11.22860	Sum squared resid	488674.7
Schwarz criterion	11.80277	Log likelihood	-873.9020
Hannan-Quinn criter.	11.46173	F-statistic	331.0212
Durbin-Watson stat	1.291422	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Eviews 12

Gambar 5. Hasil Regresi Fixed Effect

Berdasarkan hasil perhitungan dari R^2 (R-Squared) sebesar 0.986537, menunjukan

bahwa 98% IPM dijelaskan oleh variabel dalam model sisanya sebesar 2% dijelaskan diluar model. Sedangkan probabilitasnya f -statistiknya sebesar $0.000000 < 0,05$ Ha diterima maka dapat dikatakan bahwa semua variabel bebas DAU (dana alokasi umum), RAK (realisasi anggaran Kesehatan) dan PDRB secara simultan berpengaruh terhadap IPM.

Berdasarkan hasil regresi secara parsial menyatakan bahwa variabel realisasi DAU (dana alokasi umum) lebih kecil dari 0,05 sehingga menolak H_0 dan menerima H_a artinya terdapat pengaruh antara variabel dana alokasi umum (DAU) terhadap variabel indeks Pembangunan manusia. Dana alokasi umum memiliki signifikansi negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hal ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan atau perubahan dalam variabel DAU berhubungan dengan penurunan IPM. Sedangkan untuk variabel realisasi anggaran Kesehatan (X_2) memiliki probabilitas sebesar $(0.0063) < 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_a artinya terdapat pengaruh antara variabel realisasi anggaran Kesehatan (RAK) terhadap variabel Indeks Pembangunan manusia (Y). Sama halnya dengan variabel PDRB (X_3) dengan nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya ada pengaruh antara variabel realisasi PDRB terhadap variabel Indeks Pembangunan manusia (Y).

Analisis Pengaruh Realisasi Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil regresi bahwa variabel X_1 DAU (dana alokasi umum) berpengaruh signifikan negatif terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia. Penerimaan dana alokasi umum yang besar dari pemerintah pusat dapat mengurangi insentif pemerintah daerah untuk menggali sumber daya lokal dan menciptakan pendapatan sendiri. Hal ini mengakibatkan ketergantungan yang berlebihan pada DAU, yang dapat menghambat upaya daerah untuk meningkatkan pendapatan lokal dan berinvestasi dalam proyek-proyek pembangunan yang meningkatkan IPM. Selain itu DAU anggaran yang besar dapat mengurangi inisiatif dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengembangkan program-program dan kebijakan yang mendukung peningkatan IPM. Berdasarkan Teori ketergantungan dalam ilmu sosial mengklaim bahwa penerimaan DAU dalam jumlah besar oleh pemerintah daerah dapat menciptakan ketergantungan yang berlebihan pada pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintah daerah mungkin kehilangan insentif untuk mencari sumber daya dan pendapatan lokal, serta merencanakan proyek-proyek pembangunan yang dapat meningkatkan IPM. Pemerintah daerah cenderung bergantung pada DAU dan kurang termotivasi untuk meningkatkan IPM secara mandiri. Sehingga menyebabkan DAU berpengaruh signifikan negative terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Analisis Pengaruh Realisasi Anggaran Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil regresi bahwasanya X_2 (Realisasi Anggaran Kesehatan) berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan, implementasi program pencegahan penyakit, perbaikan fasilitas kesehatan, rekrutmen tenaga kesehatan berkualitas. Dengan adanya anggaran yang memadai, pemerintah dapat merekrut dan mempertahankan tenaga kesehatan yang berkualitas serta meningkatkan infrastruktur fasilitas kesehatan. Tenaga kesehatan yang memadai dan fasilitas yang baik akan membantu dalam penanganan penyakit, deteksi dini, dan perawatan yang lebih baik. Secara keseluruhan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan harapan hidup masyarakat.

Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil regresi bahwasanya X3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan indeks Pembangunan manusia. Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan listrik. Berkembangnya infrastruktur ini secara positif berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, memberikan dampak positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang kuat mendukung investasi dalam sektor pendidikan, menyediakan sumber daya yang lebih baik seperti gedung sekolah, fasilitas belajar, dan pelatihan guru, yang pada akhirnya meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan berkontribusi pada peningkatan IPM. Peningkatan PDRB juga mendukung pengembangan sistem kesehatan, termasuk pembangunan fasilitas kesehatan dan perekrutan tenaga medis, yang secara langsung meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas dan memberikan dampak positif pada kesehatan dan IPM secara keseluruhan. Sehingga Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara signifikan berkontribusi positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui peningkatan pendapatan per kapita, pembangunan infrastruktur, investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja, yang secara keseluruhan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat.

4. SIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel X1 Dana Alokasi Umum (DAU), memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam suatu konteks tertentu. Potensi dampak negatif ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketergantungan berlebihan, kurangnya inisiatif lokal, pengelolaan yang tidak efisien, kurang terfokus pada pembangunan manusia, sehingga anggaran DAU yang diberikan tidak terealisasi secara optimal. Anggaran yang besar dapat mengurangi inisiatif dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengembangkan program-program dan kebijakan yang mendukung peningkatan IPM. Di sisi lain, variabel X2, yang mencerminkan Realisasi Anggaran Kesehatan berpengaruh signifikan positif terhadap IPM. Realisasi anggaran kesehatan yang memadai dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan IPM dengan memungkinkan pemerintah merekrut dan mempertahankan tenaga kesehatan berkualitas serta meningkatkan infrastruktur fasilitas kesehatan. Terakhir, variabel X3, yang merupakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap IPM melalui peningkatan pendapatan per kapita, pembangunan infrastruktur, investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja. Secara keseluruhan, peningkatan PDRB berkontribusi positif pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aspek pembangunan manusia.

Pentingnya meningkatkan kualitas pembangunan manusia menjadi fokus utama dalam strategi pembangunan negara. Salah satu langkah yang dapat dilakukan dengan meningkatkan investasi pendidikan melalui peningkatan dana anggaran untuk sektor pendidikan, baik untuk pendidikan dasar, menengah dan tinggi, keluasannya akses dalam pendidikan serta dilakukannya pengawasan ketat terhadap transparansi anggaran

pendidikan menjadi langkah penting agar dana tersebut digunakan secara efisien, efektif, dan tepat sasaran. Selain itu, peningkatan investasi anggaran kesehatan menjadi hal yang krusial. Perlu ditingkatkan alokasi anggaran kesehatan, dan lebih penting lagi, dana tersebut harus dialokasikan dengan lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Sehingga perlu meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan, pelatihan tenaga medis, dan peningkatan infrastruktur kesehatan secara keseluruhan yang berfokus pada peningkatan akses layanan kesehatan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan.

Pentingnya memperhatikan faktor-faktor pendidikan dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan IPM. Faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan meningkatkan fasilitas, pembangunan dalam pendidikan, kesehatan dan faktor lain yang mempengaruhi pembangunan manusia sehingga negara dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan merata.

5. REFERENSI

- Fadhly, Z. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1–15.
- Fauziah, S. E. (2020). The Effect of Economic Growth and Minimum Wages in Unemployment in Bulungan District. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(3), 123–137. <https://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/299>
- Ifa, A., & Guetat, I. (2018). Does public expenditure on education promote Tunisian and Moroccan GDP per capita? ARDL approach. *Journal of Finance and Data Science*, 4(4), 234–246. <https://doi.org/10.1016/j.jfds.2018.02.005>
- Iskandar, I. (2017). Effect Of Human Development Index Fund on Economic Growth Through A Special Autonomy. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 18(1), 50. <https://doi.org/10.23917/jep.v18i1.2920>
- Latuconsina, Z. M. Y. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan dan Regresi Panel. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 1(2), 202. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2017.1.2.202-216>
- Maulina, U., & Andriyani, D. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Tpk Terhadap Ipm Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 9(1), 34. <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v9i1.3171>
- Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163–176. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.122>
- Nurwanda, A., & Rifai, B. (2018). Diagnosis Pertumbuhan Ekonomi dan Output Potensial

Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 2(3), 177–194.
<https://doi.org/10.31685/kek.v2i3.385>

Panggabean, M., Ria, E., & Matondang, L. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2017. *Prosiding SATIESP*, ISBN: 978-602-53460-3-3, 154–164.

Putrisandya, A. A., & Dewi, M. H. U. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Pdrb Terhadap Belanja Daerah Dan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal EP Unud*, 10(11), 4717–4744.

Ulfa, D. M. (2015). Analisis Pengaruh Realisasi Anggaran Pendidikan dan Anggaran Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Provinsi di Indonesia. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/21519>

Widodo, A., Waridin, W., & Kodoatie, J. M. (2012). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.25-42>